



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2023**

**PADA
DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor : 700/39/ PWS /2024
Tanggal : 24 Juni 2024



**LAPORAN HASIL EVALUASI
IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2023**

**PADA
DINAS PERTANIAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

**Nomor : 700/39/ PWS /2024
Tanggal : 24 Juni 2024**



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jl. K.H. Samanhudi No. Karanganyar Telp. (0271) 495176 Fax (0271) 494426
website : inspektorat.karanganyarkab.go.id e-mail : Inspektorat_kra @ yahoo.com

Karanganyar, 24 Juni 2024

Kepada:

Nomor : 700/39/PWS/2024

Yth. Kepala Dinas Pertanian Pangan dan

Sifat : Biasa

Perikanan Kabupaten. Karanganyar

Lampiran :

di-

Hal : Laporan Hasil Evaluasi

KARANGANYAR

Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Tahun 2023

Bersama ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, dengan uraian sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 97 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

- e. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 700/78 Tahun 2024 tanggal 6 Januari 2024 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan tahun 2024 bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
 - f. Surat Perintah Inspektur Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 800.1.11.1.115/PWS/2024 Tanggal 22 Mei 2024.
2. Latar Belakang Evaluasi
- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP.
- Evaluasi dilaksanakan mulai tanggal 27 s.d 31 Mei 2024.
3. Tujuan Evaluasi
- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP.
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP.
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja.
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
4. Ruang Lingkup Evaluasi
- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
 - c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
 - d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.
 - e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.
5. Kinerja Penilaian

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam

			mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	BB	> 70 – 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator.
4.	B	> 60 – 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada unit kerja. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

6.	C	> 30-50	<p>Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level OPD.</p>
7.	D	>0 – 30	<p>Sangat Kurang</p> <p>Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.</p>

6. Metodologi Evaluasi

- a. Wawancara
- b. Penelaahan dokumen
- c. Analisis

7. Gambaran Umum Unit Kerja

- a. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar serta Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2021 tentang Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Perangkat Daerah

Kabupaten Karanganyar memiliki tugas dalam Urusan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan. Selanjutnya, dalam melaksanakan tugas, Perangkat Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan sub bidang perikanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- 4) Pelaksanaan administrasi DispertanPP dan:
- 5) Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Penanggungjawab Program, Kegiatan dan Sub kegiatan

No	Nama	Jabatan	NIP
1	Ir Siti Maisyaroch, M.Si	Kepala Dinas	196405251989122001
2	Budi Sutresno, S.P., M.M.	Kepala Bidang Ketahanan Pangan	197311172000031007
3	Ir. Sri Ambarwati, M.M.	Kepala Bidang Perikanan	196801031993032005
4	Ir. Nur Rohmah Triastuti, M.M.	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	196701291997032001
5	Ir. Tri Atmini, M.M.	Plt. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan	196608301997032002

No	Nama	Jabatan	NIP
		Hewan	
6	Feriana Dwi Kurniawati, S.P., M.Si.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	198102262005012015
7	Sahid Joko Sembodo, S.Hut, M.M.	Kepala Bidang Perkebunan	196610121998031004
8	Nur Ernie Rohmawaty, S.P., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan	197709202011011004

8. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

- a. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karanganyar No 64 Tahun 2019.
- b. Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan Tanggal 31 Januari 2023.
- c. Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 ditetapkan pada 1 Juli 2022.
- d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ditetapkan pada 31 Januari 2023.
- e. Rencana Aksi Tahun 2023 ditetapkan pada 31 Januari 2024
- f. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2023.
- g. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 2023
- h. Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Penyusunan Data Kinerja Nomor 067/107 Tahun 2023 tanggal pembuatan 3 Januari 2023.
- i. Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 050/300 Tahun 2023 Tanggal 1 Desember 2023.

j. Target Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut :

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
I	Tujuan			
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian. Perikanan dan ketahanan pangan	Kontribusi pertanian dalam PDRB	%	13,53
		Pola Pangan Harapan	Skor	89,3
II	Sasaran			
1	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Ton	477.849
		Produktivitas pertanian tanaman pangan	Kw/Ha	63
		Produktivitas pertanian tanaman hortikultura	Ton/Ha	13
		Produktivitas pertanian perkebunan	Ton/Ha	0.70
		Produksi daging	Kg	6.224.848
		Produksi Telur	Kg	17.958.244
		Produksi susu	Liter	224.590
2	Meningkatnya ketersediaan pangan	Ketersediaan pangan utama	Kg	493.858
3	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan	Kg	2.452.973
4	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Skor	BB
		Nilai IKM	Skor	B

9. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya
 - a. Telah ditindaklanjuti dengan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja secara tepat waktu;
 - b. Telah ditindaklanjuti dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan dan pengukuran data kinerja; dan
 - c. Telah ditindaklanjuti dengan menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark Kinerja*)

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

1. Hasil akhir evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dari 0 s.d. 100, Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 memperoleh nilai sebesar **71,70** dengan predikat "**BB**"(**Sangat Baik**), telah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a. Perencanaan Kinerja	30,00	21.60
b. Pengukuran Kinerja	30,00	19,80
c. Pelaporan Kinerja	15,00	10.80
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	19.50
Jumlah	100,00	71.70

2. Nilai tersebut merupakan penjumlahan komponen - komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar Tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja (nilai 21,60 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum perencanaan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

- 1) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*), namun masih terdapat catatan yaitu:
 - a) Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) belum sepenuhnya memenuhi kriteria SMART.
 - b) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya dapat dicapai (*achievable*), menantang, dan realistis.
- 2) Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, namun masih terdapat catatan yaitu:
 - a) Aktivitas yang dilaksanakan belum sepenuhnya mendukung kinerja yang ingin dicapai.
 - b) Target yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja belum sepenuhnya dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*.
 - c) Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.
 - d) Belum sepenuhnya terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik.

b. Pengukuran Kinerja (nilai 19,80 dari bobot 30,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pengukuran kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, namun masih terdapat catatan yaitu:

1. Pengukuran kinerja telah dilakukan namun:
 - a. Belum mendasarkan pada pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
 - b. Belum sepenuhnya terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja
 - c. Belum sepenuhnya terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.
2. Pengukuran kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan, namun :
 - a. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.
 - b. Data kinerja yang dikumpulkan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja yang diharapkan.
 - c. setiap level organisasi belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang.
3. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian *Reward* dan *Punishment*, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien, namun masih terdapat catatan yaitu:
 - a) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.

- b) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja.
- c) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian aktifitas dalam mencapai kinerja
- d) Pengukuran kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja
- e) Setiap unit/satuan kerja belum sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- f) Belum setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja (nilai 10,80 dari bobot 15,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum pelaporan kinerja telah dilaksanakan cukup memadai, pada pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya, namun masih terdapat catatan yaitu:

- a) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya mengungkap seluruh informasi tentang capaian kinerja.
- b) Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai.
- c) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
- d) Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
- e) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.
- f) Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (nilai 19,50 dari bobot 25,00)

Berdasarkan hasil evaluasi, secara umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan cukup memadai, namun Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berjenjang.

Capaian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya produksi pertanian	Produksi Tanaman Pangan	Ton	477.849	482.534	100,98
		Produktivitas pertanian tanaman pangan	Kw/Ha	63	62,20	98,73
		Produktivitas pertanian tanaman hortikultura	Ton/Ha	13	15,90	122,31
		Produktivitas pertanian perkebunan	Ton/Ha	0,70	0,80	107,46
		Produksi daging	Kg	6.224.848	8.917.526	143,26
		Produksi Telur	Kg	17.958.244	21.333.380	118,79
		Produksi susu	Liter	224.590	203.700	90,70
2.	Meningkatnya ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	Kg	493.858	509.194	103,11
3	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi perikanan	Kg	2.452.973	2.453.015	100,02
4	Meningkatnya	Nilai SAKIP	Skor	BB	BB	100

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
	Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai IKM	Skor	B	B	100

Dari tabel di atas, terdapat target kinerja yang tidak tercapai adalah produktivitas pertanian tanaman pangan yaitu target 63 kw/ha hanya terealisasi 62,20 kw/ha sehingga tercapai 98,73% dan Produksi susu yaitu dari target 224.590 liter hanya terealisasi 203.700 liter sehingga prosentase capaiannya hanya 90,70%, sesuai analisis yang dicantumkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023.

3. Rekomendasi

Atas hasil evaluasi diatas; kepada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar disarankan agar:

- a. Menyusun dan menetapkan SOP/pedoman teknis pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja. Dalam SOP pengumpulan data kinerja dan SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan uraian aktifitas verifikasi dan validasi data kinerja secara berjenjang. Dalam SOP pengukuran capaian kinerja agar dimasukkan kegiatan reviu data kinerja oleh APIP. Pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja dan evaluasi kinerja internal agar dilaksanakan mempedomani SOP dimaksud dan dilaksanakan secara berkala (bulanan/tri bulanan/semester/tahunan) dan berkelanjutan.
- b. Mengajukan permintaan reviu laporan kinerja tahunan kepada Inspektorat Daerah sebelum ditetapkan.

- c. Mulai tahun 2024 agar menggunakan aplikasi SMART SAKIP Kabupaten Karanganyar dalam pengukuran capaian kinerja secara lebih optimal yaitu :
- 1) Melengkapi/menginput ke dalam menu data Renstra dengan informasi :
 - a) Sasaran strategis dan indikator sasaran, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target kinerjanya masing-masing.
 - b) Definisi operasional dari indikator kinerja, formulasi perhitungan dan sumber data.
 - 2) Melengkapi/menginput ke dalam menu progres kinerja dengan informasi :
 - a) Tujuan dan indikator tujuan, sasaran strategis dan indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan beserta target dan realisasi kinerjanya masing-masing setiap bulan.
 - b) Faktor penghambat dan faktor pendorong kinerja.
 - 3) Menggunakan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP untuk melaksanakan evaluasi kinerja dan menyusun laporan kinerja.
 - 4) Memanfaatkan informasi kinerja dalam aplikasi SMART SAKIP sebagai acuan dalam pemberian *reward* dan *punishment*.

C. PENUTUP

Demikian hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar. Kami menghargai atas upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Lingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami berharap Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi

SAKIP di Lingkungan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Pih.INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



WIDODO FERIYANTO, S.E.,Ak.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19760922 200312 1 003

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar sebagai laporan;
2. Kepala Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar.